



PENGARUH KORUPSI DAN POLITIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM

Sandi Mulyadi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281, Indonesia

✉ Corresponding Author:
Nama Penulis: Sandi Mulyadi
E-mail: sandimulyadi0406@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima : Januari 2023
Revisi : April 2023
Publikasi : Juni 2023

Abstract

This study aims to analyze the influence of corruption and political conditions on economic growth in Indonesia from 2000-2021 with an Islamic economic perspective. The variables examined in this study include economic growth, corruption which is explained by the proxy value of control of corruption, and politics which is proxied by the value of political stability. This study uses annual secondary data in Indonesia with a research period from 2000 to 2021 using linear regression analysis using the OLS method. The research results show that the variables of corruption and politics have an effect on economic growth. The implications of this research suggest that the Indonesian government continues to control and properly control corruption and maintain political stability so that economic growth will improve.

Keywords: Corruption; Politics; Economic Growth

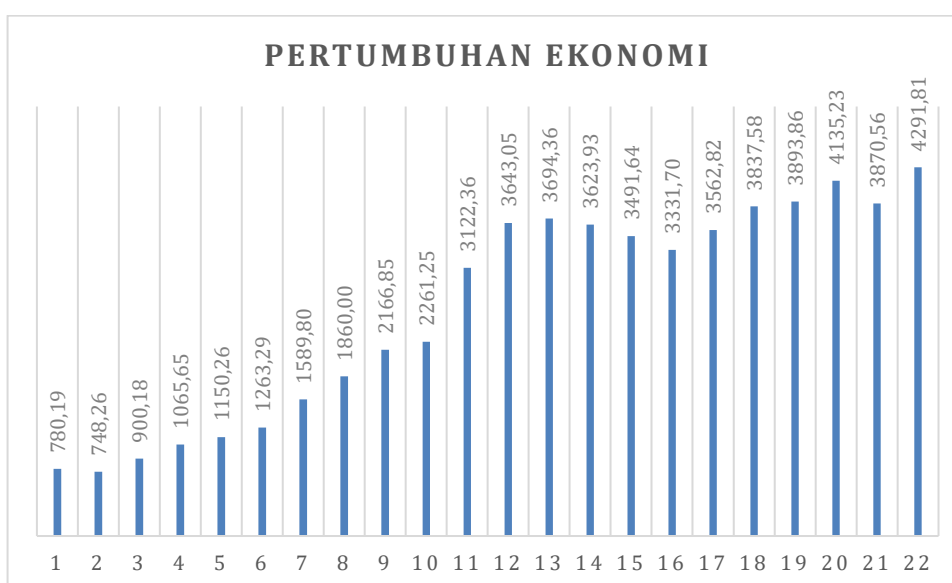
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2000-2021 dengan perspektif ekonomi syariah. Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, korupsi yang dijelaskan dengan proksi nilai control of corruption dan politik yang diproksikan dengan nilai political stability. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan di Indonesia dengan periode penelitian pada tahun 2000 sampai 2021 dengan menggunakan analisis regresi linier metode OLS. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa variabel korupsi dan politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi penelitian ini menyarankan pemerintah Indonesia untuk terus mengontrol dan mengendalikan dengan baik korupsi dan menjaga stabilitas politik supaya pertumbuhan ekonomi semakin baik.

Kata kunci: Korupsi; Politik; Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia tentunya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara. Sukirno (2010) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan Simon berpendapat pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusi, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro & Smith, 2011).

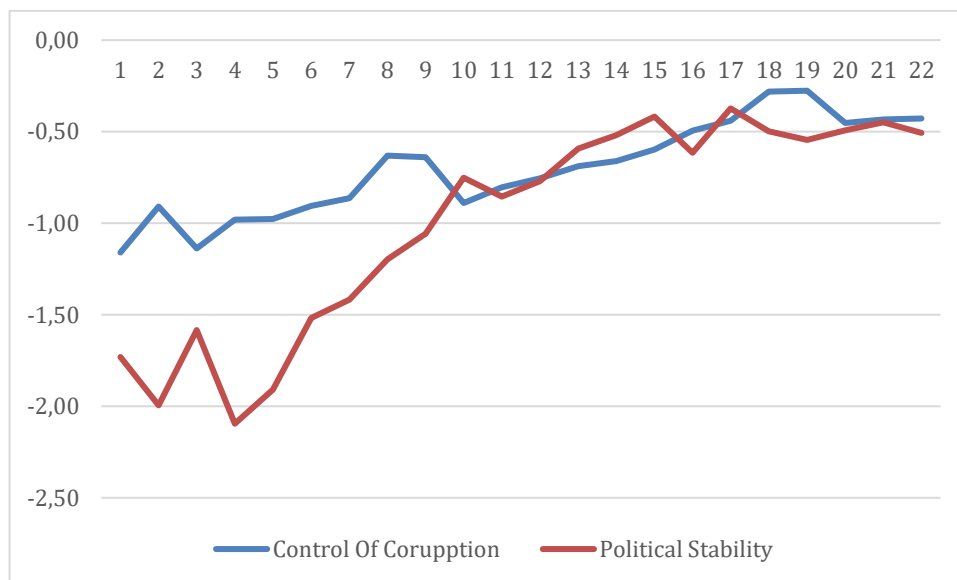


Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2000-2021
Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Berdasarkan gambar 1 dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2000-2021, pada gambar tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia secara garis besar mengalami fluktuatif dari awal penelitian hingga akhir sehingga penelitian terkait pertumbuhan ekonomi masih menarik untuk diteliti dengan menggunakan variabel lain. Menurut Wibowo (2020), pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dianalisis dari faktor ekonomi murni seperti pajak, investasi, inflasi, suku bunga dan FDI (*Foreign Direct Investment*). Di sisi lain, faktor-faktor seperti aspek tata kelola pemerintahan, korupsi, dan politik kurang dipelajari. Oleh karena itu, penelitian di bidang ini menarik dengan menganalisis apakah

tata kelola pemerintahan yang baik dapat memfasilitasi dan berfungsi sebagai alat dalam membantu mekanisme pasar secara efisien. Upaya peletakan dasar politik dalam administrasi negara dan perbaikan administrasi negara merupakan upaya awal untuk mewujudkan arah good governance (Hasbi & Wibowo, 2022).

Menurut Reniza (2022), pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditopang oleh proses pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dilaksanakan dengan baik, yang hasilnya dinikmati oleh semua, baik kelompok berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika alokasi tanggung jawab untuk pembangunan ekonomi didelegasikan kepada kelompok berpenghasilan tinggi, mereka dapat menjadi mesin pertumbuhan yang sangat baik, tetapi jika mayoritas berpenghasilan rendah dipilih, hasil pembangunan akan dibagi rata, maka harus digunakan dengan upaya pengembangan yang lebih efektif.



Gambar 2. Indeks *Control of Corruption* dan *Political Stability*
Sumber: Data diolah penulis, (2022)

Berdasarkan gambar 2 dapat menggambarkan kondisi indeks *Control of Corruption* dan *Political Stability* di Indonesia dari tahun 2000-2021, pada gambar dengan garis warna biru menggambarkan *Control of Corruption* dan warna orange menggambarkan *Political Stability*, gambar tersebut menjelaskan bahwa *Control of Corruption* dan *Political Stability* secara garis besar menggambarkan peningkatan dengan mengalami fluktuatif dari awal penelitian hingga akhir. Penelitian empiris terdahulu dibutuhkan untuk mendukung dan membandingkan serta memperkuat dalam menganalisis penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian mengenai pengaruh

korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Harish & Plouffe (2018) dalam studi kasusnya mengenai *Governance, Fiscal Decentralization*, dan *Growth* di Indonesia dengan menggunakan OLS dan VECM ditemukan bahwa adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan variabel *Governance*, serta desentralisasi fiskal baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya penelitian oleh Wibowo (2020) mengenai *Growth And Governance: A Nonparametric Analysis*, menunjukkan hasil bahwa bahwa indikator *governance* yaitu variabel *voice and accountability, political stability*, dan *rule of law* secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel *regulatory control, control of corruption*, dan *government effectiveness* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bayar (2016) dalam penelitiannya mengenai *public governance* dan *economic growth* di eropa, menggunakan panel data dan ditemukan hasil penelitian bahwa indikator tata kelola pemerintahan yaitu, *voice and accountability, political stability, the absence of violence/terrorism, government effectiveness, rule of law*, dan *control of corruption* memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali variabel *regulatory quality*. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan variabel *control of corruption* dan *rule of law* memiliki dampak terbesar, sementara stabilitas politik memiliki dampak terendah bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Haqiqi & Putra (2020) meneliti tentang korupsi dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan ketika korupsi dapat dikendalikan oleh pemerintah maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, dan penelitian Yoanda (2019) meneliti politik, korupsi, dan demokrasi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dengan penemuan bahwa bahwa korupsi berpengaruh negatif dan politik berpengaruh negatif juga, dan terakhir Tanjung (2021) meneliti tentang stabilitas politik dengan pandemi covid-19, bahwa covid-19 sangat mempengaruhi stabilitas politik sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Worldwide Governance Indicators (WGI) menyusun indikator agregat dari enam dimensi tata kelola pemerintahan yaitu: *voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption* (World Bank, 2022). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh korupsi dengan menggunakan data *Control of Corruption* dan politik menggunakan data *Political Stability* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menghubungkan dengan perspektif ekonomi syariah dalam memandang variabel penelitian,

dengan metode yang sederhana dan menggunakan data time series dari tahun 2000-2021, artinya dalam waktu 22 tahun berapa persen pengaruh korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Perkembangan kegiatan yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat dari keberadaan peningkatan produksi barang dan jasa yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro & Smith (2011), pertumbuhan ekonomi ialah jumlah kenaikan total pendapatan atau output nasional selama periode waktu tertentu, tetapi biasanya dalam waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan pendapatan nasional riil yaitu PDB (Produk Domestik Bruto). Dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar. Menurut Levine (2005), perekonomian suatu negara mengalami apa yang disebut pertumbuhan ekonomi ketika produksi barang dan jasa meningkat. Menurut teori Keynesian, PDB dibentuk oleh empat faktor yang mempengaruhi: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (Mawejje & Odhiambo, 2020).

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi, proses peningkatan output perkapita secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi bantuan sosial. Todaro & Smith (2011) mengatakan bahwa ada tiga faktor utama atau komponen pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) Akumulasi modal. Ini mencakup semua bentuk atau jenis investasi baru yang diinvestasikan dalam tanah, aset berwujud, modal atau sumber daya manusia. (2) Pertumbuhan penduduk meningkatkan jumlah tenaga kerja. (3) Kemajuan teknologi berupa cara baru atau perbaikan cara lama dalam menyelesaikan pesanan. Dalam berbagai literatur ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang wajar dari jenis yang sesuai output yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia (Muttaqin, 2018). Adapun pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti proses pengentasan kemiskinan dan terciptanya ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup (*fallah*) (Setiawan, 2020).

Korupsi Dalam Islam

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ihsan, 2019). Menurut World Bank (2022) korupsi merupakan kegiatan menawarkan, memberi, menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. Korupsi sebagai satu satunya hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi mengacaukan pembangunan dengan mendistorsi peraturan hukum dan melemahkan landasan konstitusional dimana pertumbuhan ekonomi bergantung (Rachmawati, 2021).

Akman (2018) menyatakan korupsi oleh pejabat publik dan pemerintahan yang korup memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi yang telah meningkat secara substansial. Ia juga mempertanyakan mengapa negara tidak berusaha lebih keras untuk meningkatkan perjuangan mereka melawan korupsi. Salah satu kesimpulannya mengapa korupsi begitu sulit untuk diperangi adalah karena di beberapa negara korupsi terlalu luas bagi individu bahkan untuk semua orang. korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena: (1) Menurunkan tingkat investasi. (2) Menimbulkan distorsi pada perkembangan perusahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi non formal. (3) Menimbulkan distorsi pada pengeluaran dan investasi publik serta memperburuk infrastruktur fisik (Ichvani & Sasana, 2019).

Korupsi dalam penelitian ini menggunakan data *control of corruption* merupakan cerminan persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik dilaksanakan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta penangkapan negara oleh para elit dan kepentingan pribadi Selain faktor ekonomi, tata kelola pemerintahan juga berperan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Politik menggunakan data *political stability* merupakan standar untuk mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme. Korupsi dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan yang buruk menerima atau memberikan sesuatu yang tidak benar di tempat yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Korupsi memiliki enam dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi. (1) menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan inefisiensi, (3) memudahkan jenis kejahatan lainnya, (4) melemahkan birokrasi dan jiwa korban, (5)

menurunkan kemampuan bangsa dalam memberikan pelayanan publik; dan (6) meningkatkan biaya layanan (Lutfi et al., 2020).

Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi adalah perbuatan memindahkan hak milik secara melawan hukum. Korupsi dilarang dalam Islam. tingkat pertumbuhan ekonomi. Ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan peningkatan barang dan jasa, tetapi juga aspek moralitas dan kualitas moral, keseimbangan antara tujuan sekuler dan spiritual. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari capaian materi atau kuantitatif (Ihsan, 2019), tetapi juga dari peningkatan kehidupan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. jika kamu tumbuh dewasa. Tentu pertumbuhan ini tidak sejalan dengan ekonomi Islam, karena situasi ekonomi yang muncul tentu terbelakang, semrawut dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Beik & Asryanti, 2016).

Politik Dalam Islam

Politik dalam Islam, menurut Ibnu Khaldun politik dapat meruntuhkan negara karena elit hidup dalam kemewahan dan merugikan rakyat. Untuk hidup mewah, mereka melakukan korupsi dan menyalahgunakan sumber daya (Aprianto, 2018). Politik ialah *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu manajemen negara yang menjelaskan tentang suatu negara dalam mewujudkan kepentingan umat manusia sesuai tuntunan syariah (Anang & Husein, 2020). Pada prinsipnya ada tiga persoalan pokok yang dibahas dalam *fiqh siyasah*, yaitu: (1) masyarakat sebagai subjek regulasi, (2) kebijakan dan hukum sebagai instrumen pengaturan masyarakat, dan (3) cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis dan membuktikan pengaruh korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menghubungkan dengan pandemi covid 19 yang menjadi isu kebaruan dalam penelitian dalam beberapa penelitian dan meninjau atau melihat dalam perspektif ekonomi syariah dan membuktikan seberapa besar korupsi dan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder atau termasuk penelitian secara kuantitatif yang bersifat deskriptif dan pengujian hipotesis. Adapun variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independen dari penelitian ini *control of corruption* (korupsi) dan *political stability* (politik). Fokus penelitian dilakukan di Indonesia dengan periode

penelitian dari 2000 sampai 2021. Data-data tersebut diperoleh dari *World Bank*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan metode OLS. Menurut Widarjono (2018), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan regresi linier dan berikut ini merupakan persamaan regresi linier:

$$\text{Ln}(PDB)_{it} = \beta_0 + \beta_1(CC)_{it} + \beta_2(PS)_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

LnPDB : Log pertumbuhan ekonomi

CC : *Control of Corruption*

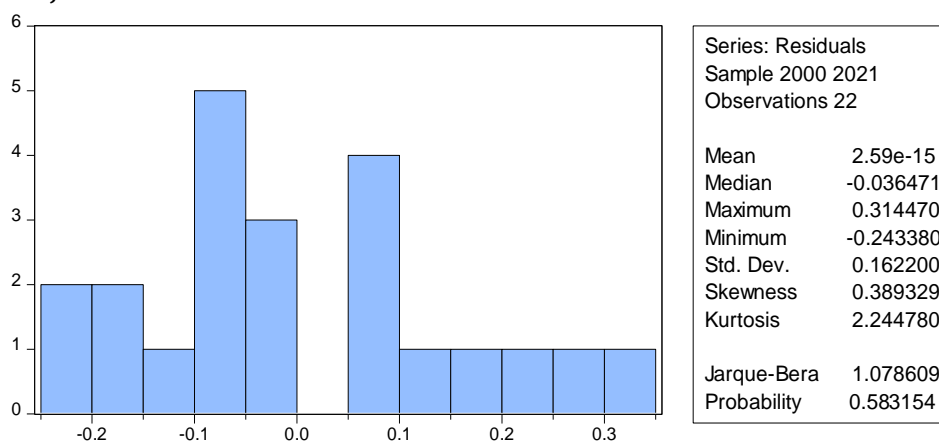
PS : *Political Stability*

e_{it} : error individu ke i waktu ke t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut dengan metode analisis regresi linier, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

Hasil Uji Normalitas



Gambar 3. Uji Normalitas
Sumber: Eviews, diolah penulis, (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan Probabilitas Jarque-bera di atas, data sudah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas Jarque-bera sebesar 1.078609, atau lebih besar dari nilai α 0,05 (5%). Karena nilai Probabilitas sebesar $1.078609 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	4.575188	Prob. F(2,19)	0.0239
Obs*R-squared	7.151175	Prob. Chi-Square(2)	0.0280
Scaled explained SS	3.018696	Prob. Chi-Square(2)	0.2211

Sumber: Eviews, diolah penulis, (2022)

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya *heteroskedastisitas* pada model regresi linier ini, pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu nilai probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-squared} > 0.05$, maka model tidak terkena *heteroskedastisitas*. Berdasarkan hasil uji White diperoleh nilai Probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-squared} 7.151175 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah *heteroskedastisitas*.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.536814	Prob. F(2,17)	0.2435
Obs*R-squared	3.368590	Prob. Chi-Square(2)	0.1856

Sumber: Eviews, diolah penulis, (2022)

Untuk mengetahui terdapat *autokorelasi* atau tidak, pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu nilai probabilitas. Jika $\text{Obs}^*\text{R-squared} > 0.05$ maka model tidak terkena *autokorelasi*. Berdasarkan tabel hasil uji diatas diketahui bahwa uji LM diperoleh nilai Probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-squared} 3.368590 > 0.05$, berarti dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah *autokorelasi*.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.012380	9.366604	NA
CC	0.061056	25.66364	2.969809
PS	0.012220	12.13986	2.969809

Sumber: Eviews, diolah penulis (2022)

Hasil Uji *Multikolinieritas* dilihat pada kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel CC (2.969809) dan PS (2.969809). Dari dua variabel Nilai VIF

tidak ada yang lebih besar dari 10% atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* pada kedua variabel tersebut.

Hasil Regresi

Dalam menganalisis pengaruh korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tahunan dari 2000 sampai 2021. Dari hasil regresi linier menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi OLS

Variabel	Model Regresi			Kesimpulan
	Koefisien	t-statistik	Probabilitas	
C	8.898493	79.97493	0.0000	
CC	0.509572	2.062252	0.0531	Signifikan
PS	0.811833	7.343940	0.0000	Signifikan
Adj.R-squared	0.928319			
Prob(F-Statistik)	0.000000		α 0,05	

Sumber: Eviews, diolah penulis, (2022)

Berdasarkan hasil regresi tabel di atas maka menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 79.97493. Hal ini berarti menunjukkan jika variabel independen *control of corruption* dan *political stability* bernilai 0, maka nilai variabel dependen adalah 79.97493. Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel CC dan PS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari α 0,05. Jika dilihat dari nilai koefisien CC sebesar 0.509572 yang bertanda positif, Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa apabila terdapat peningkatan CC sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Sementara nilai koefisien PS sebesar 0.811833 yang juga bertanda positif, hal tersebut menandakan bahwa setiap peningkatan PS sebesar 1% maka akan berimplikasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Interpretasi Hasil Uji Analisis Statistik:

Uji R²

R² (Koefisien Determinasi) menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen berupa *Control of Corruption and Political Stability* mampu menjelaskan variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi. Hasil adjusted R-Squared sebesar 0.928319 yang artinya bahwa 93% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 7%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Uji-F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hasil uji F dapat ditunjukkan pada tabel probabilitas nilai F sebesar 0,000. berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Uji-T

Uji-t atau hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Nilai t-tabel sebesar 1.98. Berikut adalah hasil uji-t dari masing-masing variabel independen: Variabel *control of corruption* memiliki nilai t-hitung sebesar $2.06 > 1.98$ t-tabel atau probabilitas lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.05 sama dengan 0.05, sehingga *control of corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Artinya, setiap kenaikan satu satuan *control of corruption* akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0.50%, dan Variabel *Political Stability* memiliki nilai t-hitung sebesar $7.34 > 1.98$ t-tabel atau probabilitas lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.00 < 0.05$, sehingga *Political Stability* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, setiap kenaikan satu satuan *Political Stability* akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0.81%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan pembahasan hasil dan implikasi hasil dari penelitian tersebut.

Control of corruption

Dalam penelitian ini, *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *control of corruption* memiliki peran sangat penting dan strategis terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya banyak asumsi yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif pada perekonomian, karena dengan adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain yang akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, dimana akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Namun, adanya praktek korupsi tidak otomatis membuat suatu perekonomian langsung ambruk dan tidak bisa berkembang. Sebagaimana yang terlihat di negara Indonesia, perekonomian tetap sempat mengalami pertumbuhan tinggi di tengah banyaknya korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Perlu dicatat pula bahwa perkembangan pesat ini diikuti dengan eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara besar-besaran, serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta, bukan karena meningkatnya produktivitas yang mencerminkan adanya pembangunan ekonomi secara riil. Dari pemaparan tersebut dapat diasumsikan bahwa *control of corruption* di suatu negara mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Asbarini et al. (2021) yang menghasilkan *control of corruption* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Political Stability

Political stability berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik dapat diartikan sebagai pola sikap dan tingkah laku segenap komponen politik yang membangun struktur dan hubungan kekuasaan sehingga dapat menjamin efektivitas pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan dua hal, yaitu: adanya pemerintahan yang stabil dalam artian dapat memerintah bertahun-tahun atau dapat menjalankan programnya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan serta yang kedua adalah sistem pemerintahan yang stabil, dalam arti sistem pemerintahan tersebut mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tidak merubah sistem pemerintahan yang ada. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Wibowo (2020) yang juga menganalisis pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi syariah berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk menghasilkan produk yang baik sebanyak mungkin. Oleh karena itu, merupakan aturan konvensional untuk memberikan kebebasan mutlak kepemilikan tanpa mencegah pemiliknya melanggar atau menyimpang dari jalan yang benar dalam memanfaatkan alam. Gagasan paradigma ini belum terbukti, tetapi perhatikan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Majid, 2011). Jika umat manusia ingin berkembang, ia harus menjaga keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini juga berharap agar masa depan Bumi tidak hancur semata-mata karena kesewenang-wenangan manusia dalam pengadaan fasilitas bumi. Jika efisiensi adalah konsep ekonomi berbasis etika, konsep berkelanjutan adalah kombinasi dari faktor politik (Asy'arie, 2015). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menguntungkan semua warga negara, termasuk

generasi yang akan datang, secara adil dan merata tanpa mempengaruhi generasi yang akan datang (Fahmi, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu variabel Control of corruption berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya adanya praktek korupsi tidak otomatis membuat suatu perekonomian langsung ambruk dan tidak bisa berkembang, variabel Political Stability memiliki pengaruh yang positif yang artinya variabel tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan kondisi pemerintahan dan politik yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Saran untuk pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan saran untuk peneliti selanjutnya bisa melengkapi keterbatasan dari penelitian ini mulai dari pengembangan yang luas terhadap variabel, objek, dan periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, B. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(4), 531–538. Anang, A. Al, & Husein, A. (2020). Genealogi Aliran-Aliran Politik Dalam Islam. *Fajar Historia*, 4(2), 68–79.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Asbarini, N. F. E., Isnaini, L., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 82–93. <https://doi.org/10.22373/jep.v12i1.606>
- Asy'arie, M. (2015). *Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis*. LESFI.
- Bayar, Y. (2016). Public Governance and Economic Growth in The Transitional Economies of The European Union. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 48, 5–18.
- Beik, I. S., & Asryianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah (Revisi)*. Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, dan PDRB Perkapita Terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 23–34.

- <https://doi.org/10.31092/jmvp.v2i1.285>
- Haqiqi, A., & Putra, H. (2020). Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 154–165. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2325>
- Harish, N., & Plouffe, M. (2018). The Political Economy of Foreign Direct Investment to Developing Countries. *Handbook of the International Political Economy of Development, June*, 1–24.
- Hasbi, H., & Wibowo, M. G. (2022). Determinants of Islamic Human Development Index in OIC Countries With Good Governance as Moderating Variables. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 173. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.14641>
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Asean 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1342>
- Ihsan, M. (2019). Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 101–112.
- Levine, R. (2005). Finance And Growth: Theory and Evidence. *Handbook of Economic Growth*, 1, 866–934.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartha, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.16482>
- Majid, M. S. A. (2011). Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), 197–205. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art6>
- Mawejje, J., & Odhiambo, N. M. (2020). The determinants of fiscal deficits: a survey of literature. *International Review of Economics*, 67(3), 403–417. <https://doi.org/10.1007/s12232-020-00348-8>
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117–122. <https://doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Reniza, P. H. (2022). Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI) dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 129–144.
- Setiawan, I. (2020). Maqashid Shariah's Criticism of the Pareto Optimum Theory. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 14–28. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.14-28>
- Sukirno. (2013). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Pustaka.
- Tanjung, S. I. (2021). Dampak Covid -19 Dalam Stabilitas Ekonomi Politik Internasional. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 654–671. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1387>



- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Eleventh). Addison-Wesley.
- Wibowo, M. G. (2020). Good Public Governance in Islamic Perspective: An Analysis on the World Governance Indicator in OIC Member Countries. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v3i1.1718>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2022). *World Development Indicators (WDI)*. <http://datatopics.worldbank.org/worlddevelopment-indicators/>
- Yoanda, A. S. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Politik terhadap Kemiskinan di delapan negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1, 845–854. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/7711>